

DEMOKRASI BELUM CAPAI KEDAULATAN EKONOMI

## Banyak Makelar, Indonesia Sulit Swasembada Pangan

**BANTUL (KR)** - Meski Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun sulit untuk swasembada pangan secara merata di seluruh daerah. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak makelar yang tidak rela jika negaranya mampu melakukakan swasembada pangan. Sementara kemiskinan yang terjadi di Indonesia karena kedaulatan ekonomi belum tercapai di negara ini.

Hal tersebut disampaikan anggota MPR RI Drs HM Idham Samawi, saat menjadi pembicara pada seminar nasional Ekonomi Kerakyatan Revitalisasi Pengelolaan SDA dan BUMN Menuju Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, di Kampus UMY, Senin (14/3), yang dihadiri Rektor UMY Dr Bambang Cipto MA, dan diikuti ratusan mahasiswa baik UMY maupun luar UMY.

Lebih lanjut Idham menjelaskan, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada maraknya barang impor. Ironisnya, impor tersebut merupakan bahan pokok seperti beras, kedelai, bahkan garam. "Menjual minyak antar-negara harus pakai make-

paye dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban dunia.

Bagian lain Idham juga menuturkan, seharusnya era perdagangan bebas, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perjanjian dan kebijakannya harus difiter. MEA hendaknya mampu melindungi petani Indonesia. "Masyarakat Thailand atau negara lain," tegasnya.

Untuk menuju berdirinya Indonesia memiliki penduduk terbanyak keempat dunia, setelah China, India dan Amerika. Namun ironisnya, China dan Amerika mampu melakukan ekspor, sementara Indonesia belum banyak mengekspor sektor vital.

Menurut Idham, saat ini tidak banyak mahasiswa yang mau memikirkan kepentingan bangsa. Di era demokrasi yang serba tidak jelas, ternyata tidak banyak pemimpin yang tahu mengapa Indonesia harus merdeka. Indonesia harus merdeka su-



KR-Bante

**Pembicara seminar dari kiri, Dr. Revisond Baswir, Drs HM Idham Samuwi, Sugeng MM Msi dan Dr H Masyuati Mulya.**

Penelitian, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Dr Revisond Baswir menambahkan, problem yang terjadi di Indonesia yakni kedaulatan belum berada sepenuhnya di tangan rakyat. Masih banyak warga miskin, pengangguran, TKI. Sebenarnya rakyat tidak membutuhkan *Coorporate Social Responsibility* (CSR). Karena bagi penganut demokrasi, berdaulat tidak ha-

nya bidang politik tetapi ekonomi. Dalam ekonomi kerakyatan, rakyat berhak menentukan siapa yang jadi direktur atas perusahaan-perusahaan pemerintah.

"Seharusnya yang perlu dikuasai rakyat adalah kapital dan modal, dengan mengikut sertakan rakyat yang memiliki perusahaan. Kalau sudah begitu, rakyat tidak butuh lagi CSR. Karena ekonomi kerakyatan, rakyat sebagai subjek bukan peminta-

nya, tegasnya. Direktur IPIEF UMY, Masyuati Mugoerobin MEdc PhD Akt menambahkan, dalam Islam mengajarkan SDA yang strategis menjadi milik bersama. "Namun saat ini misalnya, ada warga mengambil sumber air yang diklaim milik perusahaan tertentu dikatakan mencuri. Hal ini karena sumber air sudah di swastanisasi.

Hal ini karena sumber air sudah di swastanisasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Sugeng MM

Hal ini karena sumber air sudah di swastanisasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Sugeng MM

Hal ini karena sumber air sudah di swastanisasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Sugeng MM

Hal ini karena sumber air sudah di swastanisasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Sugeng MM